

YAYASAN INOVASI HUKUM EKONOMI DAN GOVERNANSI INDONESIA

KERTAS POSISI

CATATAN KRITIS TERHADAP DOKUMEN VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN 2024-2029

Chessa Ario Jani Purnomo, M. Rasyid Ridha S
Hanna Hanifah, Muhammad Miftah

November 2024



**YAYASAN INOVASI
HUKUM EKONOMI DAN
GOVERNANSI INDONESIA**

PENELITIAN | PEMERDAYAAN | ADVOKASI

KERTAS POSISI

"CATATAN KRITIS TERHADAP DOKUMEN VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN 2024-2029"

Chessa Ario Jani Purnomo, M. Rasyid Ridha S, Hanna Hanifah, Muhammad Miftah

Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia

info@yihegi.my.id

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak tahun 2024 termasuk di Provinsi Banten bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengumumkan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten nomor urut 1 atas nama Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi serta pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 2 atas nama Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Tentu saja seluruh pasangan cagub dan Cawagub Banten menyodorkan dokumen visi-misi dan program masing-masing kepada pemilih di Banten.

Namun ditengah-tengah kontestasi PILKADA Banten itu, masih menyisakan isu-isu yang kurang disoroti oleh masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub Banten baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Oleh sebab itu, Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia (YIHEGI) yang berkedudukan di Provinsi Banten dan sebagai lembaga non-governmental organization yang bersifat non-profit serta bergerak dalam penelitian dan advokasi hukum ekonomi dan governansi di Indonesia melakukan tindakan aktif-partisipatif melalui kertas posisi (position paper) ini yang berisi "catatan kritis."

YIHEGI berharap kertas posisi ini menjadi bahan rujukan bagi pemilih di Banten dalam menentukan pilihan pasangan cagub dan Cawagub Banten sesuai dengan hati nurani dan kebebasan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan. Selain itu, kertas posisi ini diharapkan menjadi masukan substansial untuk pasangan Cagub dan Cawagub Banten yang kelak terpilih (periode 2024-2029) dalam perumusan program/kebijakan pembangunan wilayah Banten kedepan.

2. Isu-Isu yang Disoroti



**YAYASAN INOVASI
HUKUM EKONOMI DAN
GOVERNANSI INDONESIA**
PENELITIAN | PEMERDAYAAN | ADVOKASI

Berkenaan dengan isu-isu yang disoroti oleh YIHEGI terhadap dokumen visi-misi dan program seluruh pasangan Cagub dan Cawagub Banten tahun 2024 baik nomor urut 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut:

- a. Isu lingkungan hidup, tata ruang dan agraria.
- b. Isu ekonomi dan pembangunan serta perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
- c. Isu peningkatan sumber daya manusia.
- d. Isu maladministrasi, korupsi dan netralitas birokrasi.

Adapun uraian atas isu-isu tersebut di atas sebagaimana di bawah ini.

B. PEMBAHASAN

1. Persoalan Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Agraria

Sebagai salah satu provinsi yang dekat dengan wilayah DKI Jakarta, Banten dihadapkan dengan berbagai macam persoalan lingkungan hidup, tata ruang, dan agraria. Persoalan tersebut merupakan basis bagi terjadinya berbagai dinamika dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Banten, yang bila tidak dikendalikan secara serius maka akan mengarah pada terjadinya dampak instabilitas sosial dan ekonomi di kawasan Banten. Adapun pada persoalan lingkungan hidup, tata ruang, dan agraria yang terjadi di kawasan Banten, terdapat 5 (lima) persoalan turunan berkaitan dengan hal ini:

Pertama, tidak terkontrolnya alih fungsi kawasan lahan produktif hijau, khususnya pertanian.¹ Kedua, penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banten untuk periode 2023-2043 cenderung memprioritaskan agenda investasi-komersialisasi tanpa memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan (sustainability) ruang hidup masyarakat lokal.² Ketiga, kawasan pesisir Provinsi Banten telah mengalami

¹ Lihat, RRI, "Alih Fungsi Lahan Pertanian di Banten Mengkhawatirkan", Link URL: <https://www.rri.co.id/daerah/510747/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-banten-mengkhawatirkan> diakses Kamis, 21-11-2024. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kawasan Banten mengalami konversi lahan pertanian secara besar-besaran, dimana lahan-lahan tersebut banyak beralih menjadi kawasan pembangunan permukiman komersial maupun kawasan industri. Ini dapat dilihat dari adanya proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk II di Kabupaten Tangerang yang melakukan pengalihan lahan dalam skala besar, yang berdampak pada hilangnya kawasan lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan lokal. Lihat, Togar Natigor Siregar & Martin Roestamy, "Tinjauan Kritis Proyek Pengembangan PIK-2 "Tropical Concept" Sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Korelasinya Dengan Hak Menguasai Negara Atas Tanah", dimuat pada Jurnal Hukum De'rechtsstaat Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Special Issue, July 2024, hlm. 39-51.

² Lihat, "RTRW Banten Kenapa Terkesan Dipaksakan?", Link URL: <https://titikkata.id/rtrw-banten-kenapa-terkesan-dipaksakan> diakses Kamis, 21-11-2024. Penyusunan dokumen kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan berkelanjutan (sustainability) berpotensi pada terjadinya konflik agraria, tata ruang, dan lingkungan hidup. Lihat, Baharuddin Thahir, "Implementasi

kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem akibat dari adanya proyek-proyek penggerakan pasir pantai dan juga proyek reklamasi.³ Keempat, kawasan perkotaan di wilayah Provinsi Banten, seperti Serang dan Cilegon misalnya, menghadapi persoalan pengelolaan sampah dan limbah.⁴ Kelima, pencegahan aktivitas penambangan liar khususnya di wilayah Banten Selatan.⁵

Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 1 (atas nama Airin Rachmi Diany & Ade Sumardi) di dalam dokumen visi-misi dan program mereka⁶ tidak menyoroti sama sekali 4 (empat) isu krusial di sektor lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang, yakni: masalah kontrol alih fungsi lahan, persoalan kebijakan rencana tata ruang wilayah yang tidak berkelanjutan, persoalan pengelolaan limbah dan sampah di kawasan perkotaan, dan persoalan aktivitas penambangan liar di kawasan Banten Selatan.

Hanya ada 1 (satu) isu krusial yang disorot di dalam dokumen visi-misi dan program Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 1, yakni berkaitan dengan persoalan kerusakan kawasan pesisir Banten. Namun terkait isu ini, mereka bingkai dalam program "Wisata Konservasi Pesisir Hijau", dimana target dari program ini adalah peningkatan rehabilitasi sumber daya alam pesisir (mangrove dan terumbu karang). Sedangkan untuk persoalan rusaknya kawasan pesisir

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten", dimuat pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49, No. 1, Mei 2023: hlm. 102 - 115. Selain itu, tercatat setidaknya terdapat konflik agraria juga di wilayah Banten dimana hal ini berkaitan dengan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah, salah satunya adalah konflik agraria di kawasan Pulau Sangiang, Banten. Lihat, KBR, "Mereka yang Menolak Ditelantarkan di Sangiang", Link URL: <https://kbr.id/berita/saga/mereka-yang-menolak-ditelantarkan-di-sangiang> diakses Kamis, 21-11-2024.

³ Lihat, Ernas, Zuleha, Thayib, M. Hasroel & Pranowo, Widodo S., "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang", Jurnal Segara, Vol.14 No.1 (2018): 35-42. Dampak dari penambangan pasir pantai dan laut tidak hanya pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan hancurnya ekosistem alam sekitar, juga berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber-sumber laut. Lihat, Ayu Adi Justicea, "Analisis Degradasi Pesisir Akibat Penambangan Pasir di Pesisir Wilayah Teluk Banten, Kabupaten Serang, Provinsi Banten", Link URL: https://www.academia.edu/20202227/ANALISIS_DEGRADASI_PESISIR_AKIBAT_PENAMBANGAN_PASIR_DI_PESISIR_WILAYAH_TELUK_BANTEN_KABUPATEN_SERANG_PROVINSI_BANTEN diakses Kamis, 21-11-2024.

⁴ Baik itu limbah industri dan kawasan pabrik telah mencemari lingkungan sekitar, dan menyebabkan masalah kesehatan masyarakat sekitar serta kerusakan ekosistem lingkungan hidup sekitar. Lihat, Jayanudin, dkk., "Kajian Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Provinsi Banten", Tahun 2022. Link URL: [https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/Laporan%20akhir%20Kajian%20Limbah%20B3_Fixed%20\(versi%20akhir\)_1693578362.pdf](https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/Laporan%20akhir%20Kajian%20Limbah%20B3_Fixed%20(versi%20akhir)_1693578362.pdf) diakses Kamis, 21-11-2024.

⁵ Terdapat sejumlah kasus aktivitas penambangan liar yang merusak kawasan hijau dan mencemari lingkungan hidup sekitar, seperti penambangan emas ilegal di Cibeber, Gunung Liman, hingga Citorek Kidul. Di sisi lain, hingga saat ini di Provinsi Banten belum ada program mitigasi serius yang sistematis untuk mencegah aktivitas ilegal semacam ini. Lihat, Fahsyah, Iwan & Basrowi, "Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten", Media Ekonomi Vol 21 No 2 (2021): 59-72. Lihat juga, Irawan, Feri, Rokilah & Hasuri, "Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten", Pro Patria Vol. 6, No. 2, (2023): 6-217.

⁶ Lihat, Dokumen Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Gubernur & Wakil Gubernur Banten Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH & H. Ade Sumardi, SE, "Banten Maju Bersama".



pantai Banten yang disebabkan oleh adanya aktivitas penggerukan pasir maupun reklamasi tidak menjadi target daripada program ini.

Sedangkan untuk Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 2 (atas nama Andra Soni & Dimyati Natakusumah) di dalam dokumen visi-misi dan program mereka⁷ tidak menyoroti 3 (tiga) isu krusial di sektor lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang, yakni: persoalan kontrol alih fungsi lahan, pencegahan aktivitas penambangan liar, dan persoalan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir akibat adanya aktivitas penggerukan pasir maupun reklamasi.

Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 2 hanya menyoroti 2 (dua) isu krusial di sektor lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang, yakni: persoalan sinkronisasi kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Banten yang lebih berfokus mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menyusun Perda RTRW-nya masing-masing -namun tidak mengkritisi problem orientasi agenda investasi-komersialisasi tanpa memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan (sustainability)-, dan persoalan pengelolaan sampah dan limbah di Banten.

Selebihnya di dalam dokumen visi-misi dan programnya tersebut, Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 2 turut menyoroti mengenai persoalan perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana alam. Meski begitu, Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 2 tidak menjelaskan bagaimana rencana aksi strategis yang lebih detail dan spesifik dalam menghadapi persoalan perubahan iklim di dalam dokumen visi-misi dan programnya tersebut, termasuk juga pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan.

Di sisi lain, persoalan perubahan iklim ini tidak disoroti sama sekali oleh Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 1 di dalam dokumen visi-misinya, sekalipun persoalan perubahan iklim sebenarnya telah menjadi isu dan agenda prioritas di skala nasional maupun global. Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 1 lebih langsung menerjemahkannya ke dalam program "Transformasi Ekonomi Hijau" dimana di dalamnya terdapat program mengenai pengembangan taman bumi sebagai wisata dunia, penerapan transisi karbon hijau, perlindungan kawasan konservasi dan pemajuan wisata hijau.

⁷ Lihat, Dokumen Visi, Misi, dan Program Gubernur & Wakil Gubernur Banten 2024-2029 Andra Soni & Dimyati Natakusumah, "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi".

Dari pembacaan dan analisis terhadap dokumen visi-misi dan program masing-masing Pasangan Cagub-Cawagub Banten pada Pilkada Banten 2024, YIHEGI menilai bahwa masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub Banten belum sepenuhnya menawarkan agenda dan program perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang secara holistik. Masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub Banten masih cenderung bersikap parsial dalam melaksanakan agenda ini. Di sisi lain, persoalan lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang adalah persoalan mendasar yang sifatnya interdependensi dan memerlukan strategi pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi, sebab segala dinamika yang muncul di dalam sektor mendasar ini berdampak luas terhadap sektor-sektor lainnya di kehidupan masyarakat dan akan menentukan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Banten kedepannya.

2. Persoalan Ekonomi dan Pembangunan Serta Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Provinsi Banten mengalami dinamika pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, ekonomi Banten sempat mengalami kontraksi sebesar 3,38 persen akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi berhasil pulih hingga mencapai 4,4 persen. Meski demikian, hingga triwulan III tahun 2024, tren pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,93 persen secara year-on-year (YoY). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya strategi yang lebih baik untuk mengatasi ketimpangan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Beberapa persoalan terkait ekonomi dan pembangunan di Provinsi Banten sebagai berikut: Pertama, tingginya tingkat pengangguran, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan relokasi sejumlah industri besar ke daerah lain.⁸ Kedua, terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan, dengan wilayah utara yang lebih maju secara infrastruktur dan ekonomi dibandingkan selatan.⁹ Ketiga, sektor pariwisata yang

⁸<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240510152646-128-537135/banten-juara-pengangguran-banyak-pabrik-pindah-ribuan-warga-di-phk> diakses Minggu, 24-11-2024. Beberapa faktor menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran di Banten, di antaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya relokasi pabrik. Pertumbuhan ekonomi Banten hanya mencapai 4,51 persen (year on year/oy) pada kuartal I-2024, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,11 persen. Kondisi ini diperparah semakin banyaknya relokasi pabrik pascapandemi Covid-19, lihat <https://regional.kompas.com/read/2024/09/23/09222001/pilkada-banten-predikat-pengangguran-terbuka-tertinggi-di-indonesia> diakses Minggu, 24-11-2024.

⁹ Wilayah Banten Utara cenderung lebih maju karena adanya industri besar, sedangkan wilayah lain, seperti Selatan, masih kurang berkembang. Ketimpangan ini terjadi karena infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik belum merata. Hal ini membuat investasi sulit menjangkau daerah-daerah tersebut. Lihat, <https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/14395341/kesenjangan-banten?page=all> diakses Minggu, 24-11-2024.

berpotensi besar juga belum dimanfaatkan secara maksimal akibat aksesibilitas dan infrastruktur yang belum memadai.¹⁰ Keempat, UMKM dan produk lokal yang memiliki kontribusi pada perekonomian lokal, masih belum mendapat dukungan yang optimal seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran.¹¹

Pasangan Cagub-Cawagub Banten Nomor Urut 1 atas nama Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, menawarkan visi "Banten Maju Bersama" dengan misi keempat yang berfokus pada pemerataan dan transformasi ekonomi yang berwawasan lingkungan.¹² Program mereka menyoroti persoalan pariwisata dan meningkatkan lapangan pekerjaan, seperti program "Transformasi Ekonomi Hijau" melalui pengembangan taman bumi (geopark) dan transisi karbon hijau, dan juga program "Pengembangan Ekonomi Biru" seperti wisata konservasi pesisir hijau untuk meningkatkan rehabilitasi kawasan pesisir, serta program "Industrialisasi dan Hilirisasi" melalui kegiatan KREASI, yang bertujuan meningkatkan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 1 tidak membahas isu ketimpangan wilayah dan mereka juga kurang menyoroti isu pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, menawarkan visi "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi" dan memiliki dua misi utama yang relevan dengan ekonomi dan pembangunan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil melalui industrialisasi dan investasi, serta pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Program mereka meliputi "BANG ANDRA", yang memperbaiki infrastruktur desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dimana program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian pada program "EKO BANTEN" yang fokus pada diversifikasi usaha dan penguatan UMKM,

¹⁰ Lihat, "Pemprov Banten dinilai belum serius kelola potensi pariwisata", Link URL: <https://banten.antaranews.com/berita/257790/pemprov-banten-dinilai-belum-serius-kelola-potensi-pariwisata> diakses Minggu, 24-11-2024. Para pelaku usaha menyebutkan, selama 20 tahun, sektor wisata di Banten tidak optimal karena persoalan aksesibilitas dan infrastruktur, lihat <https://www.tempo.co/ekonomi/pelaku-usaha-cerita-ke-sandiaga-masalah-pariwisata-banten-selama-20-tahun-524264> diakses Minggu, 24-11-2024.

¹¹ "Mahasiswa KKM Unsera Temukan Kendala UMKM di Kecamatan Carenang", Link URL: <https://www.rri.co.id/daerah/745866/mahasiswa-kkm-unsera-temukan-kendala-umkm-di-kecamatan-carenang> diakses Minggu, 24-11-2024. UMKM bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi terkendala akses permodalan hingga pemasaran.

¹² Lihat, Dokumen Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Gubernur & Wakil Gubernur Banten Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH & H. Ade Sumardi, SE, "Banten Maju Bersama".

termasuk dukungan pembiayaan dan pembentukan pusat inovasi kewirausahaan. Serta "BANG SONI", yang berupaya mengembangkan infrastruktur dan atraksi wisata untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan di atas, misalnya atas persoalan dukungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) seperti pelatihan tentang keterampilan hukum. Masih dalam konteks dukungan bagi pelaku UMK bahwa YIHEGI menilai antara lain diperlukan dukungan program/kebijakan untuk melindungi pelaku usaha mikro dan kecil terkait bantuan hukum dari pasangan Cagub dan Cawagub Banten di Provinsi Banten.

3. Persoalan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sehubungan isu peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Banten dihubungkan dengan kontestasi PILKADA Banten tahun 2024 bahwa seluruh pasangan Cagub dan Cawagub Banten baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 masih meninggalkan persoalan-persoalan yang luput dari perhatian mereka.

Adapun persoalan-persoalan yang disebut diatas terdiri dari: pertama, Kondisi pendidikan di Provinsi Banten memiliki beberapa tantangan yang perlu ditangani seperti rasio guru-murid;¹³ Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.¹⁴ Ketiga, 33 persen guru di Provinsi Banten belum tersertifikasi dan masih ada yang lulusan SMA.¹⁵

¹³ Basuki, Agung, "Pembangunan Pendidikan di Provinsi Banten," Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 3 No. 1 (2021): 100, Selain keterbatasan fasilitas pendidikan yang belum merata baik kualitas dan kuantitasnya menyangkut ketersediaan gedung dan peralatan dan sarana prasarana lainnya, akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan 12 tahun wajib belajar juga masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Provinsi Banten harus bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan pendidikan guna mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Selain itu masalah rasio guru-murid, lihat link Pilgub Banten 2024: Dampaknya pada Pendidikan di Bumi Seribu - Aksi.co, diakses Minggu, 24-11-2024.

¹⁴ Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026," hlm., 227, lihat link .Dewan Sebut Masalah Kesehatan di Banten Banyak Dikeluhkan Warga - radarbanten.co.id, diakses Minggu, 24-11-2024, Namun, yang banyak di Provinsi Banten adalah masyarakat miskin yang tidak mampu. Walaupun memiliki BPJS yang dibayar oleh pemerintah, tapi tidak menjadi solusi saat ada persoalan tempat tidur di RSUD penuh.

¹⁵ Gagas Program Banten Cerdas, Airin Ingin Tingkatkan Kualitas Guru dan Sediakan Sekolah Gratis - Zona Banten, diakses Minggu, 24-11-2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru, tidak hanya dibutuhkan gelar sarjana baik S1 maupun D4 non kependidikan sesuai dengan bidang studi. Tetapi, diperlukan pelatihan profesi setelah pendidikan sarjana untuk membekali guru dengan keahlian profesi. Selanjutnya terdapat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memberikan pelatihan pada guru yang telah menjabat. Tujuan dari ini PPG ini selain melatih keterampilan yang diperlukan dalam profesi guru juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik, atau yang lebih dikenal dengan sertifikasi guru, lihat (99+) Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka | Mariana Ulfah Hoesny - Academia.edu diakses Minggu, 24-11-2024.



Dalam hal ini pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 1 di dalam dokumen visi-misi dan program mereka¹⁶ hanya menyoroti 2 isu krusial "peningkatan sumber daya manusia" yaitu mendukung peningkatan fasilitas pendidikan dan keterserapan peserta didik dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Akan tetapi, ada 1 isu krusial yang tidak tersetor oleh pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 1 yaitu pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten. Sedangkan untuk pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 2 di dalam dokumen visi-misi dan program mereka¹⁷ hanya menyoroti 2 isu krusial "peningkatan sumber daya manusia" dengan nama program "FASKIN KITA." Program ini mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat sarana dan prasarana yang memadai serta mengimplementasikan program kesehatan yang komprehensif untuk membangun Banten yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Selanjutnya program "MASA BANTEN." Program ini bertujuan menyiapkan SDM unggul di Provinsi Banten untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Modernisasi pendidikan akan dilakukan dengan digitalisasi terintegrasi, dan riset lokal didorong untuk mengembangkan keilmuan sesuai kebutuhan daerah. Program ini juga memberikan kompensasi gaji bulanan untuk guru ngaji guna meningkatkan pendidikan moral dan agama serta fokus pada peningkatan akreditasi dari TK hingga SMA/SMK.

Tetapi ada 1 isu krusial yang tidak tersetor oleh pasangan Cagub dan Cawagub Banten nomor urut 2 yaitu peningkatan fasilitas pendidikan. Pada Program "GEN ALPHA" yang ada pada di dalam dokumen visi-misi dan program mereka hanya memfokuskan pada SMA/SMK/MA tidak dari tingkat pendidikan dasar.

Berdasarkan analisis bahwa YIHEGI menyimpulkan kedua pasangan Cagub dan Cawagub Banten tidak terfokus dengan isu strategis yang ada pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 yakni "peningkatan

¹⁶ Lihat, Dokumen Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Gubernur & Wakil Gubernur Banten Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH & H. Ade Sumardi, SE, "Banten Maju Bersama".

¹⁷ Lihat, Dokumen Visi, Misi, dan Program Gubernur & Wakil Gubernur Banten 2024-2029 Andra Soni & Dimyati Natakusumah, "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi".

sumber daya manusia." Padahal sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten saat ini.

4. Persoalan Maladministrasi, Korupsi dan Netralitas Birokrasi

Dalam konteks kontestasi Pilkada Cagub dan Cawagub Banten tersebut, rupa-rupanya mengemuka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan "reformasi birokrasi" dan "tata kelola pemerintahan yang baik." Adapun persoalan-persoalan tersebut di atas sebagai berikut: pertama, isu maladministrasi yang mana dapat melucuti hak warga dan penduduk serta meruntuhkan kepercayaan atas pelayanan publik di Banten.¹⁸ Kedua, isu korupsi.¹⁹ Menurut survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menerangkan kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten meraih skor 70 yang bermakna rentan terjadinya korupsi.²⁰ Ketiga, isu netralitas birokrasi khususnya terhadap kontestasi PILKADA di Banten itu.²¹

Pada sisi yang lain, ketika dicermati dokumen visi-misi dan program paslon Gubernur dan wagub Banten nomor urut 1²² atas nama Airin-Ade tidak membahas isu maladministrasi yang terindikasi pungutan liar, isu korupsi dan isu netralitas birokrasi. Adapun juga dokumen visi-misi dan program paslon Gubernur dan Wagub Banten nomor urut 2²³ atas nama Andra Soni-Dimiyati tidak membahas isu pungutan liar, isu korupsi dan isu netralitas birokrasi.

¹⁸<https://www.radarbanten.co.id/2024/11/16/ombudsman-sebut-pelayanan-publik-di-banten-rawan-pungli-paling-banyak-di-pertanahan/> diakses Minggu, 24-11-2024. Kepala Perwakilan Ombudsman R.I. di Provinsi Banten menyatakan antara lain "pelayanan berlarut-larut dalam layanan pertanahan, pendidikan dan adminduk yang mengarah kepada pungutan liar." Kementerian PANRB melakukan sosialisasi kepada Provinsi Banten terkait digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri, lihat <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dukung-instansi-pemerintah-se-provinsi-banten-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik> diakses Minggu, 24-11-2024.

¹⁹<https://www.liputan6.com/regional/read/5800205/kejati-banten-pastikan-pemeriksaan-wawan-dan-fahmi-hakim-bebas-dari-kepentingan-politik?page=2>, lihat link kasus korupsi berkenaan dengan pengadaan lahan seluas 60 hektar untuk pembangunan Sport Center di Kota Serang dan sedang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Banten terhadap Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim maupun Tb Chaeri Wardana (TCW) suami salah satu pasangan calon Gubernur Banten-Airin. Kasus korupsi ini juga dipantau oleh JPMI dan menyatakan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Banten untuk mengungkap kasus korupsi tersebut secara merdeka dan independen, lihat <https://tangerangpos.id/dukung-kejati-banten-usut-kasus-korupsi-aktivis-jangan-jadikan-politik-sebagai-dalih-menghindari-hukum/> diakses Minggu, 24-11-2024. Hazar melihat pemanggilan Fahmi dan TCW oleh Kejati Banten sebagai politisasi hukum di pilkada Banten, lihat <https://m.jpnn.com/news/haris-azhar-nilai-kejati-banten-lakukan-politisasi-hukum-di-pilkada-banten> diakses Minggu, 24-11-2024.

²⁰Lihat <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018529668/kota-serang-dapat-nilai-jelek-dari-kpk-masuk-daerah-rawan-korupsi?page=all> diakses Minggu, 24-11-2024.

²¹ ASN berinisial H diduga ikut kampanye paslon Gubernur nomor urut 1 Airin-Ade dan dilaporkan ke Bawaslu Banten oleh koalisi masyarakat Banten untuk perubahan, lihat <https://news.detik.com/pilkada/d-7579957/asn-pemprov-banten-dilaporkan-diduga-ikut-kampanye-calon-gubernur>.

²² <https://airinrachmidiany.com/visi-misi-airin-ade/> diakses Minggu, 24-11-2024, lihat isu strategis nomor 1 menyatakan menyatakan isu strategis nomor 1 yaitu "kurang maksimalnya birokrasi di pemerintah Provinsi Banten" dan misi nomor 1 menyatakan "meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang TERBINA (terintegrasi, bersih, inovatif dan adaptif).

²³ Lihat dokumen Andra Soni-Dimiyati berjudul "Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2024-2029, terkait isu tata kelola pemerintahan yang baik mereka memiliki program Banten Melayani dan turunan programnya disebut TEROBOS, hlm. 16, 17, 18 dan 30.

Berdasarkan analisis bahwa YIHEGI menilai isu "reformasi birokrasi" dan "tata kelola pemerintahan yang baik" sebagai berikut: pertama, seluruh dokumen visi-misi dan program paslon Gubernur dan Wagub Banten baik nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak memiliki paradigma yang jelas dan tegas atas isu tata kelola pemerintahan yang baik. "Paradigma" yang dimaksud misalnya berbasis citizen-centered governance yang menghendaki pelayanan berdasarkan kebutuhan warga dan penduduk yang notabene-nya berbeda antara satu dengan yang lain.²⁴

Kedua, absennya paradigma atas isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik c.q. netralitas birokrasi dalam dokumen visi-misi dan program seluruh paslon Gubernur dan Wagub Banten baik nomor urut 1 dan nomor urut 2 merembes kepada birokrasi yang dapat didikte oleh kekuasaan yang lain. Birokrasi tidak boleh netral. Justru birokrasi harus berpihak kepada kepentingan publik-melayani warga dan penduduk.²⁵

Ketiga, dokumen visi-misi dan program seluruh paslon Gubernur dan Wagub Banten baik nomor urut 1 dan nomor urut 2 menyebut kata digitalisasi untuk peningkatan kualitas layanan publik atas isu tata kelola pemerintahan yang baik yang tidak lebih dari sekadar mengikuti perubahan lingkungan birokrasi. Barangkali digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi layanan teknis. Tetapi tidak dapat mengubah nilai dan budaya birokrasi yang masih nampak sebagai penguasa bukan pelayan publik.²⁶

C. Penutup

Berdasarkan segala uraian di atas, YIHEGI dapat menarik kesimpulan atas analisis terhadap dokumen visi-misi dan program seluruh pasangan Cagub dan Cawagub Banten dalam hal yang tidak dapat disoroti oleh mereka, sebagai berikut **pertama**, isu lingkungan hidup, tata ruang dan agraria bahwa pasangan Cagub dan Cawagub Banten perlu menawarkan agenda dan program perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang secara holistik.

²⁴ Kurniawan, Teguh, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance," JIANA, Volume 7, No. 1 (2007): 16.

²⁵ Dwiyanto, Agus, Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia, (D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm., 49.

²⁶ Idem., hlm., 161.

Kedua, isu ekonomi dan pembangunan serta perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bahwa bahwa pasangan Cagub dan Cawagub Banten perlu mempertimbangkan antara lain kebutuhan peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi pelaku UMK dalam program/kebijakan.

Ketiga, isu peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan masih terjadi guru lulusan SMA dan belum tersertifikasi. **Keempat**, atas isu maladministrasi, korupsi dan netralitas birokrasi bahwa bahwa pasangan Cagub dan Cawagub Banten tidak memiliki paradigma yang jelas terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Daftar Pustaka

Buku:

Dwiyanto, Agus. Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia. (D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

Jurnal:

Basuki, Agung. "Pembangunan Pendidikan di Provinsi Banten," Jurnal Sumber Daya Aparatur, Volume 2 Nomor 1 (2021): 99-114.

Ernas, Zuleha, Thayib, M. Hasroel & Pranowo, Widodo S. "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang". Jurnal Segara, Vol.14 No.1 (2018): 35-42.

Fahsyah, Iwan & Basrowi. "Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten". Media Ekonomi Vol 21 No 2 (2021): 59-72

Irawan, Feri, Rokilah & Hasuri. "Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten". Pro Patria Vol. 6, No. 2, (2023): 6-217.

Kurniawan, Teguh. "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance" JIANA, Volume 7, No. 1 (2007): 52-70.

Siregar, Togar Natigor & Roestamy, Martin. "Tinjauan Kritis Proyek Pengembangan PIK-2 "Tropical Concept" Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Korelasinya Dengan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." Jurnal Hukum "De'Rechstaat" (2024): 39-51.

Thahir, Baharuddin. "Memahami Kebijakan Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten." Jurnal Ilmu Pemerintah Widya Pradja Vol. 49 No. 1 (2023): 102-115.

Dokumen:

Diany, Airin Rachmi & Sumardi, Ade. "Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024-2029."

Soni, Andra & N. Dimyati. "Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2024-2029."

Internet:

<https://www.radarbanten.co.id/2024/11/16/ombudsman-sebut-pelayanan-publik-di-banten-rawan-pungli-paling-banyak-di-pertanahan/> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dukung-instansi-pemerintah-se-provinsi-banten-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik> diakses Minggu 24-11-2024.

<https://www.liputan6.com/regional/read/5800205/kejati-banten-pastikan-pemeriksaan-wawan-dan-fahmi-hakim-bebas-dari-kepentingan-politik?page=2> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://tangerangpos.id/dukung-kejati-banten-usut-kasus-korupsi-aktivis-jangan-jadikan-politik-sebagai-dalah-menghindari-hukum/> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://m.jpnn.com/news/haris-azhar-nilai-kejati-banten-lakukan-politisasi-hukum-di-pilkada-banten> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018529668/kota-serang-dapat-nilai-jelek-dari-kpk-masuk-daerah-rawan-korupsi?page=all> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://news.detik.com/pilkada/d-7579957/asn-pemprov-banten-dilaporkan-diduga-ikut-kampanye-calon-gubernur> diakses Minggu, 24-11-2024.

https://www.academia.edu/99621229/Permasalahan_dan_Solusi_Untuk_Meningkatkan_Kompetensi_dan_Kualitas_Guru_Sebuah_Kajian_Pustaka?auto=download diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-238570740/gagas-program-banten-cerdas-airin-ingin-tingkatkan-kualitas-guru-dan-sediakan-sekolah-gratis?page=all> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://www.radarbanten.co.id/2023/07/02/dewan-sebut-masalah-kesehatan-di-banten-banyak-dikeluhkan-warga/> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://aksi.co/2024/10/20/bagaimana-pengaruh-pilgub-banten-2024-terhadap-sektor-pendidikan/> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://www.rri.co.id/daerah/745866/mahasiswa-kkm-unsera-temukan-kendala-umkm-di-kecamatan-carenang> diakses Minggu 24-11-2024.

<https://www.tempo.co/ekonomi/pelaku-usaha-cerita-ke-sandiaga-masalah-pariwisata-banten-selama-20-tahun-524264> diakses Minggu 24-11-2024.

<https://banten.antaranews.com/berita/257790/pemprov-banten-dinilai-belum-serius-kelola-potensi-pariwisata> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/14395341/kesenjangan-banten?page=all> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://regional.kompas.com/read/2024/09/23/09222001/pilkada-banten-predikat-pengangguran-terbuka-tertinggi-di-indonesia> diakses Minggu, 24-11-2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240510152646-128-537135/banten-juara-pengangguran-banyak-pabrik-pindah-ribuan-warga-di-phk> diakses Minggu, 24-11-2024.

[https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/Laporan%20akhir%20Kajian%20Limbah%20B3_Fixed%20\(versi%20akhir\)_1693578362.pdf](https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/Laporan%20akhir%20Kajian%20Limbah%20B3_Fixed%20(versi%20akhir)_1693578362.pdf) diakses Kamis, 21-11-2024.

https://www.academia.edu/20202227/ANALISIS_DEGRADASI_PESISIR_AKIBAT_PENAMBANGAN_PASIR_DI_PESISIR_WILAYAH_TELUK_BANTEN_KABUPATEN_SERANG_PROVINSI_BANTEN diakses Kamis, 21-11-2024.

<https://kbr.id/berita/saga/mereka-yang-menolak-ditelantarkan-di-sangiang> diakses Kamis, 21-11-2024.

<https://titikkata.id/rtrw-banten-kenapa-terkesan-dipaksakan> diakses Kamis, 21-11-2024.

<https://www.rri.co.id/daerah/510747/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-banten-mengkhawatirkan> diakses Kamis, 21-11-2024.



Copyright © Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia

Kutipan yang disarankan: Purnomo, Chessa Ario Jani, et.al. Catatan Kritis Terhadap Dokumen Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024. (Tangerang Selatan: YIHEGI).

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Yayasan Inovasi Hukum Ekonomi dan Governansi Indonesia

Ruko Zahra Nomor 3, Jalan Balai Desa Lama, RT 03 RW 02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, 15314.

Email: yihegi@gmail.com

Webiste: yihegi.my.id

Instagram: yihegi.id

Hotline: +62 878 1939 8188



**YAYASAN INOVASI
HUKUM EKONOMI DAN
GOVERNANSI INDONESIA**
PENELITIAN | PEMERDAYAAN | ADVOKASI